

## INTISARI

### **IMPLEMENTASI CONVENTIONS ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT 1971 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING, KALIMANTAN TENGAH**

Alam Surya Anggara<sup>1</sup>, Marsudi Triatmodjo<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi *Conventions on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971* terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Situs Ramsar Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah dalam mencegah degradasi ekosistem gambut di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, sejak ditetapkan sebagai Situs Ramsar di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Subyek penelitian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi *National Focal Point* dari Konvensi Ramsar, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan Wetlands International Indonesia sebagai mitra pemerintah. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Ramsar, telah dilaksanakan dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan peraturan-peraturan yang tidak sinkron, sehingga belum dapat melaksanakan komitmen pemanfaatan lahan basah secara bijaksana (*wise use*) dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan degradasi lahan basah, terutama ekosistem gambut di Tanjung Puting. Upaya pencegahan degradasi gambut harus dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan masyarakat dan mengintensifkan sosialisasi agar tercipta *sense of belonging*, dan *ownership*.

Peran Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah perlu dioptimalkan untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai pelaksanaan Konvensi Ramsar, sekaligus mengembangkan peran LSM, perguruan tinggi dan swasta untuk melakukan pengembangan penelitian dan pendidikan konservasi lahan basah. Ekosistem gambut yang rusak perlu segera dilakukan pemulihan. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat daerah penyangga perlu terus dilakukan dengan didukung sarana prasarana yang memadai. Masyarakat secara bersama-sama akan menjaga fungsi ekosistem gambut tetap baik kondisinya.

Kata Kunci: Konvensi Ramsar, Lahan Basah, Degradasi Gambut, Taman Nasional

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2014.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF CONVENTIONS ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT 1971 IN THE CONTEXT OF THE PEATLAND ECOSYSTEM MANAGEMENT AND PROTECTION IN TANJUNG PUTING NATIONAL PARK, CENTRAL KALIMANTAN**

Alam Surya Anggara<sup>3</sup>, Marsudi Triatmodjo<sup>4</sup>

This research aims to examine and analyze the implementation of the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971 on the peatland ecosystem protection and management at Tanjung Puting National Park Ramsar Site, Central Kalimantan. This research also aims to describe and analyze Government efforts and policy to prevent the degradation of peatland in Tanjung Puting National Park, Central Kalimantan, since it was established as Ramsar Site in Indonesia.

This research is a normative-empirical law research. Subjects of this research are the Ministry of Forest and Environment as the National Focal Point of the Ramsar Convention, the Tanjung Puting National Park and Wetlands International Indonesia as the partners. Normative-empirical law research basically use secondary data that be obtained from library research and primary data that be obtained from field research.

The Ramsar Convention have been transformed and implemented into Indonesian law. In practice, still found non-synchronized regulations that have not been able to implement the sustainable and wise use of wetlands. The implication is caused wetland degradation, especially the peatland ecosystems at the Tanjung Puting National Park. The implementation of the prevention of peatland degradation must be holistic by involving the community and make intens socialization in order to create a sense of belonging and ownership.

The National Committee on the Management of Wetland Ecosystems needs to optimized and make an in-depth evaluation of the implementation of the Ramsar Convention, as well as to develop the role of NGOs, universities and the private sector to develop a research and education of wetland conservation. Degraded peatlands need immediate restoration. The government should make good empowerment and economic development and support a good infrastructure of the villagers in buffer zone. Communities together will keep the function of peatland ecosystem in a good condition.

Keywords: Ramsar Convention, Wetlands, Peatland Degradation, National Park

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada 2014.

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.